

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP  
KINERJA PERANGKAT NAGARI DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS  
UNP sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Serjana Administrasi Publik*



**INDRILITA MAULIDYA  
TM/NIM : 2015/15042034**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2019**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Kinerja Perangkat  
Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten  
Pasaman  
Nama : Indrilita Maulidya  
NIM/TM : 15042034/2015  
Jurusan : Ilmu administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 13 Agustus 2019

Disetujui oleh:  
Pembimbing



Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D  
NIP. 19630401198903 1 003

**PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Selasa, Tanggal 13 Agustus 2019 Pukul 14.00 s/d 15.00 WIB

**Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kinerja Perangkat Nagari  
dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman**

Nama : Indrilita Maulidya  
NIM/TM : 15042034/2015  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

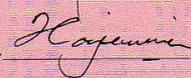
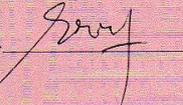
Padang, 15 Agustus 2019

**Tim Penguji**

Nama

1. Ketua : Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D
2. Anggota : Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si
3. Anggota : Rahmadani Yusran, S.Sos. M.si

Tanda Tangan

1.   
2.   
3. 

Mengesahkan  
**Dekan FIS UNP**



**Dr. Siti Fatimah, M. Pd, M. Hum**  
NIP. 19610218 198403 2 001

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indrilita Maulidya

NIM/TM : 15042034/2015

Tempat/Tanggal Lahir : Dumai/16 Desember 1996

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul "Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman" adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,

  
**Indrilita Maulidya**  
NIM. 15042034

## ABSTRAK

### **INDRILITA MAULIDYA : TM/NIM 2015/15042034 Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kinerja perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman. Latar belakang penelitian ini dilakukan adalah karena masih kurangnya implementasi kebijakan tentang pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan bentuk penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat nagari yang ada di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Bonjol dan Kecamatan Simpang alahan Mati Kabupaten Pasaman yang berjumlah 96 orang responden. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 88 perangkat nagari yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5% dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik *Proportionate Stratified Random Sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket yang disebarakan kepada responden dengan pengukuran skala likert. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda.

Dari analisis data yang telah dilakukan maka hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengaruh sub variabel implementasi kebijakan terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman yaitu: pengaruh variabel komunikasi terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari adalah sebesar 14,0%, pengaruh variabel sumberdaya terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari adalah sebesar 17,4%, pengaruh variabel disposisi terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari adalah sebesar 10,8%, dan pengaruh variabel struktur birokrasi terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari adalah sebesar 18,5%. Secara simultan pengaruh komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman sebesar 19,4%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan keuangan nagari berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari.

**Kata Kunci:** *Implementasi kebijakan, kinerja, pengelolaan keuangan nagari*

## KATA PENGANTAR



*Assalammu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman"**. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosaial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi S.H, M.Hum., Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing.
4. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku dosen penguji I dan Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si selaku dosen penguji II.

5. Bapak dan Ibu dosen pengajar beserta staff administrasi Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
6. Seluruh staff karyawan dan karyawan keputakaan dan staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
7. Teristimewa kedua orangtua tercinta Ayahanda M.Dinan dan Ibunda Mardiana serta kakak dan adik-adik penulis, terimakasih yang tak terhingga atas do'a, motivasi, dan ketulusannya mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar penulis yang penulis cintai dan sayangi.
9. Teman-teman Sepenelitian 2018 yang berjuang mendapatkan gelar Sarjana.
10. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Administrasi Publik angkatan 2015, Universitas Negeri Padang.
11. Dan spesial untuk Rido Nanda Putra, S.Pd yang selalu setia mendampingi dan memberikan semangat.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Padang, 28 Juli 2019

**Indrilita Maulidya**  
NIM/TM. 15042034/2015

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	12
1. Konsep Implementasi Kebijakan .....	12
2. Konsep Kinerja.....	21
3. Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kinerja Pegawai ....	26
4. Perangkat Nagari .....	28
5. Pengelolaan Keuangan Nagari .....	29
6. Indikator Pengukuran Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari .....	33
B. Kerangka Konseptual .....	34
C. Penelitian yang Relevan .....	35
D. Hipotesis Penelitian .....	36

### **BAB III METODOLOGI PENULISAN**

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Operasionalisasi Variabel .....	38
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	43
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	43
E. Instrumen Penelitian .....	46
F. Jenis, Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	47
G. Validitas dan Reliabilitas .....	48
H. Teknik Analisis Data.....	52

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum.....	58
B. Profil Responden.....	60
C. Temuan Khusus.....	65
D. Pembahasan.....	88
E. Keterbatasan Penelitian.....	93

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Jumlah Perangkat Nagari di Tiga Kecamatan Kabuapten Pasaman Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 .....	44
Tabel 2. Tabel Pengukuran Variabel .....	47
Tabel 3. Uji Validitas Variabel Implementasi Kebijakan .....	49
Tabel 4. Uji Validitas Variabel Pengelolaan Keuangan Nagari.....	50
Tabel 5. Uji Reliabilitas Variabel Implementasi Kebijakan .....	52
Tabel 6. Uji Reliabilitas Variabel Pengelolaan Keuangan Nagari .....	52
Tabel 7. Profil Responden Menurut Klasifikasi Umur .....	61
Tabel 8. Profil Responden Menurut Jenis Kelamin .....	61
Tabel 9. Profil Responden Menurut Status Perkawinan .....	62
Tabel 10. Profil Responden Menurut Pendidikan Terakhir .....	62
Tabel 11. Profil Responden Menurut Jabatan .....	63
Tabel 12. Formasi Responden Menurut Pendapatan Bersih .....	64
Tabel 13. Profil Responden Menurut Masa Kerja .....	64
Tabel 14. Deskripsi Variabel Komunikasi .....	65
Tabel 15. Deskripsi Variabel Sumberdaya.....	66
Tabel 16. Deskripsi Variabel Disposisi.....	67
Tabel 17. Deskripsi Variabel Struktur Birokrasi.....	68
Tabel 18. Deskripsi Variabel Transparansi .....	69
Tabel 19. Deskripsi Variabel Akuntabilitas .....	71
Tabel 20. Deskripsi Variabel Partisipasi .....	72
Tabel 21. Deskripsi Variabel Disiplin dan Taat Anggaran .....	73

Tabel 22.	Deskripsi Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Nagari .....	74
Tabel 23.	Hasil Kontribusi (R) Variabel Komunikasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	75
Tabel 24.	Hasil Uji Anova (F) Variabel Komunikasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	76
Tabel 25.	Hasil Uji T Variabel Komunikasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	76
Tabel 26.	Hasil Kontribusi (R) Variabel Sumberdaya terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	77
Tabel 27.	Hasil Uji Anova (F) Variabel Sumberdaya terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	77
Tabel 28.	Hasil Uji T Variabel Sumberdaya terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	78
Tabel 29.	Hasil Kontribusi (R) Variabel Disposisis terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	79
Tabel 30.	Hasil Uji Anova (F) Variabel Disposisi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	79
Tabel 31.	Hasil Uji T Variabel Disposisi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	80
Tabel 32.	Hasil Kontribusi (R) Variabel Struktur Birokrasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	80
Tabel 33.	Hasil Uji Anova (F) Variabel Struktur Birokrasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	81
Tabel 34.	Hasil Uji T Variabel Struktur Birokrasi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	81
Tabel 35.	Hasil Uji Multikoleniaritas Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Nagari .....	85
Tabel 36.	Hasil Uji Autokorelasi Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Nagari .....	86
Tabel 37.	Hasil Kontribusi (R) Pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari.....	87

Tabel 38. Hasil Uji Anova (F) Pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari.....	87
---	----

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Kerangka Konseptual .....	34
Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintah Nagari Kabupaten Pasaman Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 .....	59
Gambar 3. Hasil Uji Normalitas Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Nagari .....	82
Gambar 4. Hasil Uji Linearitas Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Nagari .....	83
Gambar 5. Hasil Uji Heterokedastisitas Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Nagari .....	84
Gambar 6. Pengaruh dan Kontribusi Variabel X terhadap Y .....	89

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota. Setiap provinsi dan kabupaten/kota tersebut mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi menurut ketentuan umum pasal 1 ayat (7) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Menurut Mardiasmo (2002:46) Pada dasarnya tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Kebijakan otonomi daerah tersebut berdampak pada perubahan, seperti yang di jelaskan oleh Roni (2016:256) bahwa kebijakan otonomi daerah membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan tata keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah.

Kuangan daerah merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul, 2004:18). Menurut ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

Agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI, demi tercapainya nawacita tersebut maka pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan saat ini. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Istilah desa seperti yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 disesuaikan penyebutannya dengan istilah lain yang berlaku di daerah setempat. Salah satu sebutan lain itu diantaranya adalah “nagari” untuk di Minangkabau.

Sejak dikeluarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semua mata tertuju kepada desa yang dikarenakan akibat pemberian dana desa yang jumlahnya makin besar oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius untuk memajukan desa. Agar tujuan pemerintah untuk memajukan desa dapat terwujud maka tidak bisa hanya mengandalkan ketersediaan regulasi saja namun juga dibutuhkan partisipasi dari *stakeholders* terkait dan ketersediaan dana desa. Untuk mencapai kemajuan desa maka diperlukan para kepala desa dan perangkat desa yang mempunyai kapasitas dalam pengelolaan keuangan desa yang telah dilimpahkan pemerintah. Oleh karena itu mereka harus memahami dan mengerti isi kebijakan tentang desa sehingga pengelolaan keuangan desa tidak akan mengalami masalah serius kedepannya.

Masalah pengelolaan keuangan desa masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat (6) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APB Desa/Nagari yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk dari peraturan perundang-undangan. Maka hal ini berarti pemerintah desa atau kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran tidak boleh sembarangan mengelola keuangan desa. Selanjutnya dalam ketentuan umum Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 2 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Rincian Dana

Desa Setiap Nagari dan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016 pasal 1 ayat (17) dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan nagari.

Selanjutnya rincian penggunaan anggaran dana desa dalam pengelolaan keuangan desa (dalam jumlakbimkonkeudesda 2015) didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat desa dibagi menjadi dua yaitu untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30% dan untuk biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebesar 70%. Dari total keseluruhan biaya belanja aparatur dan operasional pemerintah desa digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa sebesar 50%, untuk operasional BPD sebesar 25% dan untuk biaya tunjangan kesejahteraan aparatur pemerintah desa sebesar 25%. Sedangkan total keseluruhan biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk belanja modal sebesar 70% seperti biaya perbaikan sarana dan prasaranan publik; penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes; pengadaan ketahanan pangan; perbaikan lingkungan dan keamanan dan kegiatan penting lainnya; dan untuk biaya penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebesar 30% seperti penunjang kegiatan PKK, LPMD, RT/RW, Karang Taruna dan Hansip.

Ada beberapa masalah dalam pengelolaan keuangan nagari selama ini yaitu keterbatasan regulasi khusus tentang nagari yang tidak cukup membantu wali nagari dan perangkatnya dalam pengelolaan keuangan nagari. Hal ini

terlihat jelas dari adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintahan nagari dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan nagari. Salah satu contohnya adalah Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman yang terlambat melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBNagari), sehingga proses pencairan Alokasi Dana Desa juga terlambat dan tidak terealisasi tepat waktu. M.Ikhsan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBN itu masuk ke kas daerah pada bulan April lalu. Namun baru terealisasi ke kas nagari pada bulan Juni kemarin. Hal itu disebabkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBNagari) banyak yang terlambat melaporkannya (BakiNews, 2017) (diakses pada 20 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Nagari Limo Koto pada tanggal 22 Maret 2019 beliau mengatakan bahwa permasalahan dalam pengelolaan keuangan nagari yaitu terdapat tumpang tindihnya aturan yang harus diikuti oleh pemerintah nagari dan banyaknya program lintas sektoral yang dibebankan kepada pemerintah nagari sehingga program prioritas nagari menjadi terganggu akibat tekanan program dari pemerintah yang lebih tinggi. Selain itu berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Zulfahmi selaku Walinagari Koto Kaciak pada tanggal 25 Maret 2019 beliau mengatakan bahwa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan nagari diantaranya yaitu sering terjadi perubahan peraturan tentang pengelolaan keuangan nagari dan lambatnya informasi perubahan tersebut sampai ke pemerintah nagari. Menurut beliau masih kurangnya sosialisasi dari

pemerintahan yang lebih tinggi juga menjadi permasalahan dalam pengelolaan keuangan nagari. Selanjutnya, berdasarkan hasil temuan dilapangan penulis menemukan kurang jelasnya Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari, dimana peraturan yang sudah direvisi tersebut tidak melampirkan secara utuh keseluruhan isi peraturan tersebut akan tetapi hanya melampirkan perubahan dari peraturan yang sebelumnya saja.

Selain itu, berdasarkan hasil temuan penulis di lapangan terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman seperti berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kaur Keuangan Nagari Aia Manggih pada tanggal 24 Juni 2019 beliau mengatakan bahwa sering terlambatnya informasi pengimplementasian sistem yang baru dalam pengelolaan keuangan nagari dari pemerintah yang di atas kepada pemerintahan nagari. Sehingga pengurusan APBNagari pemerintahan nagari terlambat. Senada dengan hal tersebut Kaur Keuangan Nagari Sundata saat wawancara pada tanggal 24 Juni 2019 beliau juga mengatakan bahwa informasi perubahan sistem dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman sering terlambat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kaur Keuangan Nagari Durian Tinggi pada tanggal 26 juni 2019 beliau mengatakan bahwa rancangan APBNagari tidak selalu sinkron dengan sistem yang ada disebabkan karena sering dirubahnya sistem pengelolaan keuangan nagari oleh

pemerintah di atas sehingga APBNagari yang sudah dirancang sebelumnya harus diulang kembali sesuai dengan sistem yang baru akibatnya laporan APBNagari terlambat. Selain itu Kaur Keuangan Nagari Koto Kaciak saat wawancara pada tanggal 28 Juni 2019 beliau mengatakan bahwa permasalahan keuangan nagari di kabupaten Pasaman adalah kurang memahaminya tupoksi dan tanggungjawab masing-masing perangkat nagari dan masih kurangnya fasilitas yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan nagari. Sehingga pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman belum dijalankan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang penulis temukan bahwa terdapat hasil penelitian yang menyatakan implementasi kebijakan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryadi (2015) dengan judul Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kinerja Pelayanan Publik, dengan hasil yang didapatkan bahwa secara empirik implementasi kebijakan telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja pelayanan publik di Pemerintah kota Bandung. Kemudian Kartini (2016) juga melakukan penelitian yang serupa dengan judul Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Kinerja Pegawai dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan pada Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Kementerian Agama Kota Bandung, dengan hasil yang didapatkan bahwa secara parsial implementasi kebijakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kementerian Agama Kota Bandung.

Menurut Riant Nugroho (2009: 494 ) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Adapun teori dalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yang menjelaskan bahwa terdapat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Mulyadi, 2016 : 68).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Pasaman dengan judul **“Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Terdapat beberapa nagari di Kabupaten Pasaman yang terlambat dan kesulitan dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan nagari.
2. Ditemukan indikasi kecurangan dalam mengelola keuangan nagari pada beberapa nagari di Kabupaten Pasaman.
3. Terdapatnya peraturan yang tumpang tindih dan banyaknya program lintas sektoral yang dibebankan kepada pemerintah nagari.
4. Sering terjadinya perubahan peraturan mengenai pengelolaan keuangan nagari dan lambatnya informasi perubahan tersebut sampai kepada pemerintah nagari.
5. Kurangnya sosialisasi dari pemerintahan yang lebih tinggi.

6. Tidak jelasnya isi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari.
7. Masih kurang memahaminya tupoksi dan tanggungjawab masing-masing perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari.
8. Masih kurangnya fasilitas yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan nagari.

### **C. Batasan Masalah**

Mengingat cukup luasnya permasalahan di atas dan juga karena keterbatasan tenaga, dana serta waktu saat penelitian, maka penelitian ini tidak mengungkap seluruh aspek yang telah dijabarkan sebelumnya. Adapun batasan masalah yang diteliti adalah pengaruh implementasi kebijakan terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh komunikasi terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman?
2. Apakah terdapat pengaruh sumberdaya terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman?
3. Apakah terdapat pengaruh disposisi terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman?

4. Apakah terdapat pengaruh struktur birokrasi terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman?
5. Apakah terdapat pengaruh implementasi kebijakan terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman.
2. Mengetahui pengaruh sumberdaya terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman.
3. Mengetahui pengaruh disposisi terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman.
4. Mengetahui pengaruh struktur birokrasi terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman.
5. Mengetahui pengaruh implementasi kebijakan terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan konsep ilmu pengetahuan yang terkait dengan ilmu administrasi negara tentang implementasi kebijakan dan Administrasi Keuangan Publik.

## 2. Secara praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi perangkat nagari, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan nagari.
- b. Bagi walinagari, penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait dengan pengaruh implementasi kebijakan terhadap kinerja sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam mengelola keuangan nagari.
- c. Bagi peneliti, secara akademis dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang terjadi dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana administrasi publik pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.